

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN

Mahadi Bahtera ⁽¹⁾, Herizal ⁽²⁾

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Jabal Ghafur

e-mail: mahadi@unigha.ac.id, herizal@unigha.ac.id

ABSTRAK

Kajian ini mengevaluasi peran pemangku kepentingan dalam Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (RIDP) dan menganalisis intensitas partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program dengan kesediaan membayar. Selain itu, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode campuran sekuensial dengan statistik deskriptif, Context Input-Output and Outcome Process (CIPOO), Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Willingness to Pay (WTP). Hasil analisis menunjukkan bahwa aktor utama dalam pemberdayaan masyarakat. program tersebut adalah masyarakat yang diikuti oleh pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku usaha. WTP komunitas adalah Rp 5.100, yang membantu mereka untuk mempertahankan keberlanjutan dan memelihara proyek-proyek yang dibangun oleh pemerintah secara aktif. Proses pemberdayaan merupakan faktor terpenting diikuti oleh konteks dan input sebagai prioritas kedua, sedangkan output dan hasil menjadi prioritas ketiga.

Kata Kunci : pemberdayaan masyarakat, infrastruktur pedesaan

Pendahuluan

Prioritas pembangunan di Indonesia saat ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan pembangunan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesenjangan kesejahteraan ditandai salah satunya dengan perbedaan kemiskinan perkotaan dan pedesaan. Laporan BPS (2017) menyebutkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2016 sebanyak 28,01 juta jiwa atau 10,86 persen dari total penduduk Indonesia. BPS menemukan kesenjangan antara proporsi penduduk miskin di perkotaan dan pedesaan. Pada Maret 2015, proporsi di pedesaan mencapai 17,94% sedangkan di perkotaan proporsinya lebih rendah, 10,65%. Angka tersebut sedikit menurun pada Maret 2016, masing-masing menjadi 17,67% dan 10,34% (<https://www.bps.gHai.Indo/>). Perbedaan angka kemiskinan yang tinggi terjadi karena

kesenjangan pembangunan infrastruktur di perkotaan dan pedesaan.

Infrastruktur saat ini menjadi kebutuhan utama dalam pembangunan pedesaan. Ketersediaan infrastruktur baik gedung maupun jalan akan memberikan kemudahan akses bagi perkembangan ekonomi lokal. Infrastruktur penting untuk mempercepat kemajuan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Infrastruktur adalah barang dan jasa publik yang masuk ke dalam proses produksi sebagai input pelengkap faktor produksi tradisional seperti modal, tenaga kerja, dan kewirausahaan. Mereka membantu meningkatkan laba atas investasi dengan mengurangi biaya produksi dan meningkatkan efisiensi transisi. Ketersediaan infrastruktur dan efisiensi layanan menentukan keberhasilan proses produksi lainnya. Investasi dalam infrastruktur seperti energi, air, transportasi, dan teknologi

komunikasi mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kondisi kehidupan di negara berkembang. Infrastruktur masa depan dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang cukup kompleks. Pembangunan infrastruktur penting dan diperlukan untuk lepas landas industri dan pertumbuhan ekonomi, tetapi peningkatan jumlah dan infrastruktur berteknologi tinggi tidak menjamin pertumbuhan ekonomi (De Haan, Romp, & Sturm, 2007). Di sisi lain, pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur berskala besar, mengalami dilema karena akan berdampak lingkungan yang merupakan tantangan jangka panjang dan dikhawatirkan berdampak pada perubahan iklim. Pembangunan infrastruktur yang paling menonjol terjadi di Asia Timur, terutama Cina dan Vietnam.

Keterlibatan masyarakat di tingkat akar rumput mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan proyek menjadi sebuah keniscayaan. Proyek yang dijalankan masyarakat dapat dikelola dan dipelihara dengan lebih baik. Masyarakat dapat bekerja dengan pengembang proyek dan menangani beberapa aspek proyek. Pemberdayaan adalah masalah yang kompleks dan dapat dilihat pada tingkat individu, organisasi atau komunitas dan terkait erat. Di tingkat masyarakat dan organisasi, hasil pemberdayaan tergantung pada tingkat keberdayaan anggotanya. Pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai proses dimana orang dapat mengambil kekuasaan untuk bertindak secara efektif untuk mengubah kehidupan dan lingkungan mereka. Proses pemberdayaan masyarakat mendorong partisipasi, memecahkan masalah lokal, meningkatkan kontrol individu dan masyarakat, serta meningkatkan kualitas hidup dan keadilan sosial. Sejauh ini, belum ada konsensus tentang metode atau tindakan yang diterima secara universal

untuk mengevaluasi proses pemberdayaan masyarakat (Kasmel & Andersen, 2011).

Berdasarkan latar belakang tersebut, Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (RIDP) yang bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, sehingga dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kemiskinan dan keterbelakangan di Indonesia, daerah pedesaan. RIDP merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis pembangunan infrastruktur pedesaan yang terdiri dari 1) masyarakat pemberdayaan, dimana seluruh proses kegiatan mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga pemeliharaan melibatkan peran aktif masyarakat; 2) keberpihakan kepada masyarakat miskin, di mana hasil dari kegiatan proses dan pemanfaatan diupayakan untuk berdampak langsung kepada masyarakat miskin; 3) otonomi dan desentralisasi, di mana pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program dan keberlanjutan infrastruktur; 4) partisipatif, dimana masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses kegiatan, dan masyarakat miskin, perempuan dan minoritas memiliki kesempatan untuk berperan aktif; 5) kemandirian; 6) program pembangunan terpadu, artinya program-program tersebut terintegrasi dengan program pembangunan pedesaan lainnya; 7) penguatan kapasitas kelembagaan; dan 8) kesetaraan dan keadilan gender.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran pemangku kepentingan dalam Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (RIDP) di Kabupaten Pidie dan menganalisis intensitas partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan RIDP dengan kesediaan membayar. Penelitian ini juga

untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat.

Penataan infrastruktur secara langsung dan tidak langsung akan mengubah lingkungan pedesaan menjadi lebih tertata (Laah, Adefila, & Yusof, 2014). Negara-negara berkembang telah mengalami pertumbuhan dalam pembangunan infrastruktur meskipun masih banyak kekurangan dalam jumlah, kualitas, dan aksesibilitas bagi masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Kekurangan tersebut akan mempengaruhi daya saing melambatnya kinerja sektor ekonomi, kesehatan, dan pendidikan yang merugikan masyarakat miskin di pedesaan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di daerah akan menciptakan kesadaran, mobilisasi, dan potensi kreatif termasuk bakat, keterampilan, sumber daya manusia, dan keuangan. Hasil penelitian di negara-negara Afrika di 2010 menunjukkan bahwa investasi infrastruktur yang cukup besar hingga 15% dari PDB seringkali tidak efisien karena manajemen publik yang lemah. Sektor swasta telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan efisiensi dan akses tetapi belum menjadi alternatif untuk keterlibatan dan pembiayaan publik. Kelemahan lain dalam pembangunan infrastruktur yang tidak efisien adalah tidak adanya pemantauan pengeluaran infrastruktur dan kondisi (Marianne Fay & Toman, 2010). Kebutuhan masyarakat yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur pedesaan melalui pemberdayaan menunjukkan pergeseran implementasi yang spesifik. Kebijakan dan strategi diarahkan terutama pada pengendalian alam, pertimbangan teknologi, struktur ekonomi, dan kondisi demografi dengan mempertimbangkan nilai, adat istiadat, struktur sosial dan partisipasi politik (Khan, 2005).

Metode

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberdayaan masyarakat dianalisis dengan Context, Input, Process, Output, dan Outcome (CIPOO). Konteks meliputi aspek kelembagaan, sistem manajemen, kinerja organisasi, dan penguasaan materi; masukan meliputi aspek internal dan eksternal; proses terdiri dari pendekatan untuk pengembangan kapasitas, manajemen publik baru, kinerja, dan substansial seperti pengetahuan, sikap, dan praktik; Keluaran; dan Hasil (Maciulskytė, 2014). Penelitian ini menggunakan metode campuran sekuensial dengan statistik deskriptif, Context Input-Output and Outcome Process (CIPOO), Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Willingness to Pay (WTP) (Saaty, 2008).

Tahapan dalam analisis metode penilaian kontingen (CVM) dalam penelitian ini adalah a) Menciptakan Pasar Hipotetis untuk merumuskan alasan mengapa orang perlu membayar barang atau jasa lingkungan; b) Responden menerima penawaran nilai WTP (Mendapatkan penawaran) dengan Bidding Game, Closed-ended Referendum, Payment Card, dan Open-ended Question. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bidding Game karena penelitian ini ingin mengetahui derajat publik partisipasi dalam memberikan kontribusi terhadap keberhasilan PPIP dilihat dari nilai WTP yang paling rendah.

Penelitian ini menggunakan 125 responden dan sepuluh informan kunci. Responden akan diwawancarai dengan kuesioner terstruktur untuk analisis kuantitatif. Informan kunci akan diwawancarai secara mendalam untuk mendapatkan masukan dalam analisis kualitatif. Responden dipilih dengan metode aksidental, sedangkan informan kunci merupakan tokoh utama dalam pelaksanaan PPIP

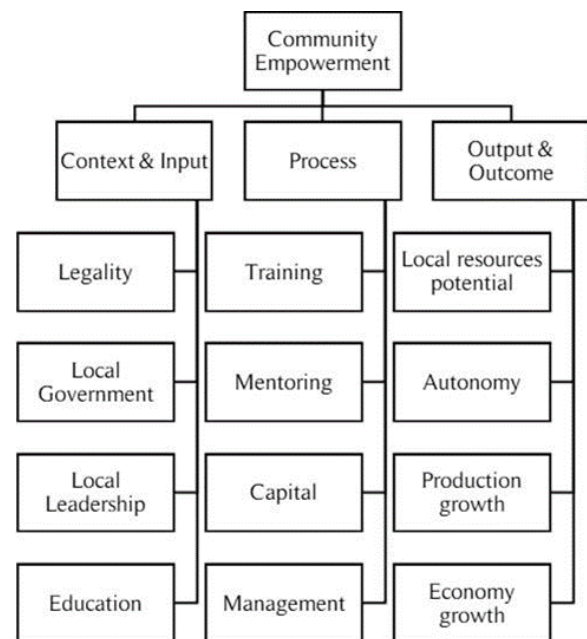
Hasil dan Pembahasan

Tujuan pertama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi peran pemangku kepentingan dalam kegiatan PPIP. Stakeholder terdiri dari empat aktor yaitu akademisi, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, sedangkan tahapan kegiatan dibagi menjadi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Nilai evaluasi berkisar antara 1 sampai 10 yang tergolong sangat kurang, kurang baik, cukup, baik dan sangat baik. Responden diminta untuk memberikan penilaian terhadap kinerja masing-masing pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat memperoleh nilai tertinggi sebesar 7,71 untuk semua tahapan kegiatan, disusul oleh pemerintah dengan nilai rata-rata 6,30 atau cukup. Peran ketiga adalah akademisi dengan nilai 6,10, sedangkan dunia usaha memiliki nilai terendah dalam penerapan PPIP ini, yaitu 4,48 atau kurang.

Tujuan kedua dari penelitian ini adalah untuk menghitung nilai sumber daya keuangan yang akan dan mampu dibayar oleh masyarakat dengan kemauan membayar (WTP). Metode yang digunakan untuk menghitung WTP adalah metode valuasi kontingen (CVM). Estimasi WTP yang valid akan digunakan untuk mengembangkan strategi penetapan harga yang optimal.

Tujuan ketiga penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat melalui program pembangunan infrastruktur. Strategi pemberdayaan masyarakat yang digunakan adalah pengorganisasian masyarakat, pengembangan berbasis masyarakat, dan pemberian layanan berbasis masyarakat. Faktor makroekonomi dan struktur sosial dapat mendorong atau menghambat mobilisasi akar rumput. Diskusi ini menekankan pentingnya pengembangan kepemimpinan, perencanaan strategis, dan pembangunan jaringan (lintas lingkungan,

kota, dan wilayah) dengan memobilisasi orang untuk memecahkan masalah bersama. Kendala utama dalam pengorganisasian masyarakat adalah kurangnya pelatihan pengembangan kepemimpinan dan peningkatan kapasitas organisasi (Kelly, 2010). Penelitian ini menggunakan CIPOO (Context, Input, Process, Output, dan Outcome) yang akan diolah dengan Analytical Hierarchy Process (AHP).



Gambar 1. Hirarki masalah

Gambar 1 menunjukkan hierarki masalah pemberdayaan masyarakat. Masalah pemberdayaan dibagi menjadi tiga: konteks dan input, proses, dan output dan hasil. Konteks dan input dibagi menjadi empat variabel: legalitas, pemerintah daerah, kepemimpinan lokal, dan pendidikan, sedangkan prosesnya dibagi menjadi pelatihan, pendampingan, permodalan, dan manajemen.

Simpulan dan Saran

Hasil analisis menunjukkan bahwa peran utama dalam proses pemberdayaan masyarakat berbasis PPIP adalah masyarakat diikuti oleh pemerintah daerah, akademisi, dan dunia usaha. Berdasarkan tujuan pertama

ini, direkomendasikan agar pemerintah memberikan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya RIDP. Hasil kedua ditemukan bahwa WTP masyarakat sebesar Rp 5.100, artinya dalam menjaga keberlanjutan dan pemeliharaan proyek yang dibangun oleh pemerintah, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dengan nilai WTP tersebut. Hasil ketiga menunjukkan bahwa dalam pemberdayaan, proses merupakan faktor terpenting dan prioritas utama dengan pelatihan dan pendampingan sebagai variabel turunannya. Sementara itu, konteks & input menjadi prioritas kedua, dan output & hasil menjadi prioritas ketiga. Disarankan agar pemerintah selalu memantau pelaksanaan atau proses pemberdayaan masyarakat agar masyarakat berdaya dan mandiri. Penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi keilmuan, khususnya teori institusional dan teori ekonomi regional berbasis partisipasi masyarakat.

Daftar Pustaka

Amirnejad, H., & Aminravan, M. (2013). Penerapan metode penilaian kontingen untuk memperkirakan nilai rekreasi Hutan Sari. *Jurnal Internasional Ilmu Pertanian dan Tanaman*, 5 (10), 8-11.

Breidert, C., Hahsler, M., & Reutterer, T. (2006). Sebuah tinjauan metode untuk mengukur kesediaan-untuk-membayar. *Pemasaran Inovatif*, 1-32.

<https://doi.org/10.3111/13696998.2011.644408>

De Haan, J., Kejar-kejaran, W., & Sturm, J. (2007). Modal publik dan pertumbuhan ekonomi: isu-isu kunci untuk Eropa. Seminar Internasional IMF tentang Penguatan Investasi Publik dan Pengelolaan Risiko Fiskal dari Kemitraan Pemerintah-Swasta.

Fernández-Moral, MJ, Vidueira, P., Díaz-Puente, JM, & Nicolás, VL De. (2015). Evaluasi pemberdayaan di Spanyol: Peran teman yang penting dalam bekerja dengan masyarakat pedesaan. *Procedia - Ilmu Sosial dan Perilaku*, 191, 984-989.
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.483>

Kasmel, A., & Andersen, PT (2011). Pengukuran pemberdayaan masyarakat dalam tiga program komunitas di Rapla (Estonia). *Jurnal Internasional Penelitian Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat*, 8(3), 799-817.
<https://doi.org/10.3390/ijerph8030799>

Kelly, P. (2010). Kemiskinan di Skotlandia: Tiga tantangan untuk pengembangan masyarakat. *Masyarakat Pemberdayaan: Perspektif Kritis dari Skotlandia*. Glasgow.

Laah, ED, Adefila, J., & Yusof, R. (2014). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur pedesaan yang berkelanjutan di Riyom Area, Plateau State of Nigeria. *Jurnal Ekonomi dan Berkelanjutan Perkembangan*, 5(4), 49-57.

Marianne Fay, & Toman, M. (2010). Infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan. 1. Busan Korea Selatan. <https://doi.org/10.1080/15568310601091957>

Saaty, TL (2008). Pengambilan keputusan dengan proses hierarki analitik. *Jurnal Layanan Internasional Ilmu Pengetahuan*, 1(1), 83.
<https://doi.org/10.1504/IJSSCI.2008.017590>